

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2012

Kegiatan DPR-RI minggu kedua Maret 2012 diawali dengan Rapat Paripurna tanggal 6 Maret, dipimpin ketua DPR dengan acara tunggal, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR-RI tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR-RI.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali

Sebelum agenda Rapat Paripurna dimulai, Ketua Rapat membacakan adanya 8 surat-surat masuk, yaitu surat masuk dari Presiden RI tertanggal 12 Februari, 5 Maret, perihal penyampaian RUU tentang Veteran RI dan RUU tentang Perdagangan. Surat Presiden RI tertanggal 28 Februari perihal penyampaian nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pemilihan Umum (Bawaslu), Surat presiden RI tertanggal 29 Februari Perihal Penyampaian RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012. Tiga surat dari Presiden RI tanggal 2 Maret perihal permohonan pertimbangan bagi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Kyrgistan, Republik Oriental Uruguay, dan Persatuan Emirat Arab untuk Republik Indonesia. Satu surat dari Pimpinan Komisi V tertanggal 5 Maret perihal RUU usul inisiatif Komisi V DPR-RI tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Jalan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib, surat yang berkaitan dengan penyampaian RUU diserahkan kepada Badan Musyawarah untuk membahasnya, surat yang berkaitan dengan RUU APBN-P diserahkan kepada Badan Anggaran untuk membahas sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, sedangkan surat yang berkaitan dengan pencalonan duta-duta besar akan ditugaskan kepada Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Fraksi-Fraksi untuk membahasnya.

Catatan: hasil rapat Konsultasi Pengganti Bamus se-



lasa, 6 Maret, diputuskan bahwa pembahasan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu diserahkan kepada Komisi II, penanganan RUU tentang Veteran RI diserahkan kepada Komisi I, penanganan RUU tentang Perdagangan diserahkan kepada Komisi VI, sedangkan usulan Komisi V mengenai RUU inisiatif tentang Jalan akan diagendakan dalam Rapat Paripurna terdekat untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi.

## PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Pada Rapat paripurna tanggal 6 Maret, Fraksi-fraksi telah menyetujui RUU usul inisiatif baleg tentang Perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi RUU DPR yang akan dibahas/diproses lebih lanjut sesuai tata tertib. Adapun pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan RUU usul inisiatif ini adalah [a] bahwa negara RI sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warganegara; [b] bahwa kepastian ketertiban dan perlindungan hukum, salah satunya diwujudkan dengan bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang; [b] bahwa sebagian ketentuan dalam UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dengan UU baru; [c] bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c, perlu mengubah UU No. 30 tahun 2004 tentang Notaris. Dengan demikian, RUU ini segera akan dilanjutkan dengan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan.

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

## PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III DPR melanjutkan RDP dengan pimpinan KPK pada 1 Maret 2012. Kesimpulannya antara lain: [1] Komisi III mendesak KPK untuk meningkatkan koordinasi, supervisi dan monitoring penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, [2] mendesak KPK untuk menyusun peraturan internal (*internal measures*) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme, prosedur dan kriteria penanganan dan pengambilan keputusan pada setiap tahapan tugas, mulai dari tahapan verifikasi laporan masyarakat, tahap penyelidikan, dan tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi, termasuk dalam menetapkan tersangka dan saksi-saksi, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas. [3] mendesak KPK untuk mempercepat pengisian jabatan dan penempatan pejabat-pejabat definitif yang memiliki integritas, akuntabel dan profesional dan struktur organisasi KPK agar pelaksanaan tugas dan fungsi KPK lebih efektif dan efisien. [4] mendesak KPK mempercepat penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat dan berdampak sistemik terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dan akuntabel untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. [5] mendukung KPK meminta BPK melakukan audit kinerja terhadap KPK sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya lembaga KPK yang independen, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam melakukan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.

## PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Pada tanggal 29 Februari 2012, Presiden telah menyampaikan Surpres No. R-25/Pres/02/2012 perihal RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2012. Sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka RUU ini harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Dengan demikian, Badan Anggaran DPR berencana bahwa, pada 29 Maret 2012 RUU APBN ini akan memasuki pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di tingkat Rapat Paripurna.

Tanggal 7 Maret, Badan Anggaran mengundang Raker Menteri keuangan dan Gubernur BI. Selain membahas mengenai mekanisme proses pembahasan RUU, juga akan membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan substansi. Dalam RUU APBN-P, Komisi VII dan Komisi XI akan melakukan bahasan, selain berkaitan dengan anggaran Kementerian/Lembaga, juga akan membahas mengenai Asumsi Dasar APBN-P. Komisi-komisi DPR dari tanggal 8 sampai 12 Maret, masing-masing akan melakukan raker dengan pasangan kerja untuk membahas anggaran perubahan yang berkaitan dengan Kementerian dan Lembaga (K/L).

Diluar proses pembahasan APBN-P, Komisi-Komisi DPR masih ada yang melanjutkan pembahasan tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN tahun 2011, tindaklanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2011, dan rencana pelaksanaan APBN 2012.

RDP Komisi III DPR-RI dengan Pimpinan KPK pada tanggal 1 Maret 2012 berkaitan dengan fungsi anggaran berkesimpulan bahwa Komisi III mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Komisi III akan meninjau kembali mengenai usulan pembangunan gedung KPK yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Komisi III juga meminta KPK meningkatkan pelaksanaan tugas monitoring terhadap pemanfaatan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD oleh penyelenggara pemerintahan negara di setiap kementerian dan setiap satuan kerja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di lingkungan BUMN/BUMD sehingga pemanfaatan anggaran tersebut menjadi tepat guna dan tepat sasaran serta akuntabel.

## KEGIATAN REGIONAL

Pada sidang umum AIPA ke-32 di Kamboja September 2011, Ketua DPR telah ditetapkan sebagai Presiden AIPA untuk kurun waktu sampai dengan sidang umum AIPA ke-33 tahun 2012. Dalam posisi sebagai Presiden AIPA, Ketua DPR akan memimpin delegasi AIPA untuk menghadiri The 20th ASEAN Summit and the Celebration of the 45th Anniversary of ASEAN, pada tanggal 2-4 April 2012. Pada tanggal 3 April 2012 petang hari, diagendakan pertemuan antara para kepala-kepala negara/kepala pemerintahan dengan Ketua-Ketua Parlemen. Pertemuan ini berjudul ASEAN Leaders Meeting with ASEAN Interparliamentary Assembly/AIPA Representatives. Dalam pertemuan ini Presiden AIPA menyampaikan statemen atas nama AIPA. Dalam statemen, antara lain menekankan bahwa AIPA meyakini pentingnya pertemuan semacam ini dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang memerlukan keterlibatan seluruh institusi dan elemen negara, pemerintahan dan masyarakat. Dimana AIPA harus memberikan kontribusi yang lebih efektif dan konstruktif.

Kebijakan eksekutif yang dicapai di tingkat Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN hendaknya dapat disinergikan dengan pembahasan di berbagai pertemuan AIPA, demikian juga sebaliknya. Langkah-langkah penguatan integrasi ASEAN kiranya dapat diselaraskan dalam ketiga pilar termasuk Pilar Sosial-Budaya yang mencakup banyak bidang seperti pendidikan, kebudayaan, perubahan iklim, penanggulangan bencana, pekerja migran, teknologi informasi, dan kesehatan. ASEAN dan AIPA juga perlu meningkatkan upaya bersama dalam mengeksplorasi keunggulan kreatifitas di berbagai bidang bagi kemajuan dan kemakmuran bersama di kawasan.\*

# Komisi X DPR UU DIKTI Jamin Mahasiswa Kurang Mampu

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU Perguruan Tinggi Komisi X DPR, Syamsul Bachri mengatakan semangat dari Undang-Undang Perguruan Tinggi (Dikti) adalah memberikan perlindungan dan jaminan bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang kurang mampu. UU ini nantinya akan menjamin jika ada mahasiswa yang tidak mampu membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), mereka tidak boleh di drop out (DO).



Tim Panja RUU Perguruan Tinggi saat mengunjungi salahsatu perguruan tinggi di Makassar dalam rangka mencari masukan terkait RUU DIKTI

**H**al itu disampaikan Syamsul Bachri kepada wartawan di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, usai memimpin rombongan Panja RUU Perguruan Tinggi Komisi X DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/3). Kunjungan Panja RUU Dikti ke Makassar dalam rangka mendapat masukan dari sejumlah civitas akademika seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas 45 Makasar, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, agar bisa mendapat masukan terkait RUU yang rencananya akan disahkan menjadi Undang-Undang akhir bulan ini.

Selain Syamsul Bachri, turut serta dalam rombongan Panja RUU Dikti ke Makassar, diantaranya, Nasrudin (FPG), Dedi Wahidi (FPKB), Raihan Iskandar (FPKS), Rinto Subekti (FPD), dan Dedi Suwandi Gumelar (FPDIP).

Syamsul Bachri, politisi dari Partai Golkar itu menegaskan tidak boleh ada mahasiswa yang DO hanya karena persoalan ekonomi. “Undang-undang menjaminkannya. Perguruan tinggi juga dilarang menolak calon mahasiswa

sepanjang dia lulus tes. Perguruan Tinggi yang wajib mencari jalan agar dia kuliah,” ujarnya.

Syamsul mengatakan kunjungan kerja tersebut tidak hanya di gelar di Makassar, tapi juga di dua daerah lain, yaitu Banjarmasin dan Jawa Timur. Kunjungan di tiga kota itu bertujuan memberi kesempatan stakeholder untuk menkritisi, memberi masukan yang

lebih lengkap tentang substansi yang diatur dalam UU ini nantinya.

“Adapun yang dibahas menyangkut akreditasi, status, pembiayaan, pengelolaan, pengalokasian, organisasi mahasiswa dan hak-hak mahasiswa dan ternyata yang banyak dikritisi adalah status perguruan tinggi, biaya kuliah yang mahal,” jelasnya.

Dalam RUU tersebut mengatur maksimal sepertiga biaya pendidikan dibebankan kepada masyarakat dan sisanya ditanggung pemerintah, tapi juga akan diusahakan turun jadi seperempat atau seperlima. Sama halnya biaya penelitian yang saat ini hanya 2,5 persen dari anggaran operasional yang nilainya kurang dari Rp1 triliun akan diatur agar bisa mencapai angka antara Rp7 hingga Rp10 triliun.

Dalam RUU Dikti yang terdiri atas 10 bab dan 119 pasal tersebut, memberikan otonomi pada perguruan tinggi untuk mengelola semuanya juga diatur. Namun, kata Syamsul, jangan diartikan otonomi itu sebagai komersialisasi, karena itulah yang dihindari dalam UU tersebut.

Otonomi Perguruan tinggi dan

otonomi akademik yang dimaksud dalam kerangka yang sebentar lagi jadi UU tersebut jelas politikus Partai Golkar tersebut diatur sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan karena ada koridornya, mahasiswa tidak perlu khawatir.

“Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi harus diterima dan melanjutkan studi. Bagaimana perguruan tinggi mengatasi, dengan bantuan atau beasiswa,” pungkas Syamsul.

Sedianya pertemuan yang harusnya berlangsung di sejumlah kampus di Makassar akhirnya dibatalkan. Pertemuan akhirnya disepakati di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Soal tidak diundangnya mahasiswa, Syamsul Bachri mengatakan itu bukan faktor yang disengaja.

“Ini bukan kesengajaan. Ini kekhilafan. Bisa hadir tertib tapi jangan unjuk rasa. Kami wakil adik-adik. Soal komersialisasi, itu tidak akan ada. Kami jamin. Terkait biaya penelitian, akan diupayakan ditingkatkan,” kata Syamsul.

Dalam pertemuan itu, juga disinggung soal rencana penghapusan biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. (SNMPTN). “Kita tidak mau ada biaya seleksi UMPTN. Mudah-mudahan 2013 tidak ada lagi biaya seperti formulir dan lain-lain. Undang-undang ini pro rakyat,” katanya.

Mengomentari pernyataan soal lembaga kemahasiswaan di kampus, Syamsul mengatakan perlu ada relaksasi. Ia menilai, pada dasarnya, tetap harus ada koridor yang diikuti, namun itu tak membelenggunya. Dalam pertemuan itu juga mengemuka persoalan batasan usia bagi profesor atau guru besar. Selain itu juga muncul pertanyaan seputar dana penelitian. (nt) foto:parle

# Komisi VII Minta PLN Tolak Utang Diboncengi Kepentingan Kontraktor Asing

Dalam beberapa kasus ditemukan pinjaman lunak tersebut diboncengi kepentingan dari perusahaan/kontraktor negara pendonor.

“Kalau era Orde Baru jelas-jelas pinjaman itu satu paket, uangnya, jasa pelaksana, berasal dari negara bersangkutan jadi kita dalam posisi lemah, tidak bisa mengontrol efisiensi dan efektifitas penggunaan pinjaman. Itu tugas kita DPR memperbaiki itu,” kata Totok Daryanto Ketua Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI saat meninjau PLTGU Keramasan di Palembang, Sumsel, Jumat (2/3/12).

Ia mengaku terkejut ketika mendapat informasi tender proyek PLTGU Keramasan yang didukung pinjaman lunak dari JICA Jepang senilai Rp.380 miliar dimenangkan Marubeni Co. kontraktor yang juga berasal dari negara matahari terbit itu. Politisi PAN ini menekankan setiap proyek yang dibiayai donor asing harus sebesar mungkin diberdayakan untuk kepentingan ekonomi nasional, termasuk memberi kesempatan kepada perusahaan dalam negeri. “Jangan sampai pinjaman ini hanya menjadi beban masa depan bagi anak cucu kita,” tandasnya.

Anggota Komisi VII Asfihani menyampaikan rasa kecewa karena jajaran pimpinan PLN dalam rapat usai peninjauan lapangan, tidak dapat memperlihatkan data-data pendukung yang lengkap. “Kita tidak mau tanda tangan persetujuan terus dan mungkin hutang tidak perlu sebesar itu. Proses ini tidak transparan, loan dari Jepang kontraktor juga dari Jepang, saya minta penjelasan lengkap tertulis sebelum tanggal 7 ini,” tandasnya.

Politisi Partai Demokrat ini meminta PLN menjelaskan kenapa satu perusahaan dalam negeri yang cukup berpengalaman PT. Medco dikalahkan dalam proses prakualifikasi. Ia menekankan langkah yang dilakukan DPR ini jangan dianggap sebagai intervensi, tetapi upaya membangun transparansi dan

PT. PLN sebagai perusahaan milik negara harus mempunyai sikap yang tegas dan jelas dalam membangun kerjasama pada program pinjaman seperti Soft Loan Agreement – SLA dengan negara lain.



Tim Komisi VII DPR saat meninjau PLTGU Keramasan di Palembang, Sumsel

kehati-hatian karena anggaran dari negara donor bukan hibah, jadi harus dikembalikan dengan uang rakyat.

Sementara itu anggota Komisi VII dari FPDIP Nazarudin Kiemas mempertanyakan kebijakan PT. PLN yang banyak membangun pembangkit listrik kapasitas kecil seperti PLTGU Keramasan yang hanya memiliki daya 80 MW. Sumsel menurutnya jelas memiliki sumber daya cukup untuk pengembangan kelistrikan dengan daya yang lebih besar.

“Policy kedepan patut dikoreksi jangan yang kecil-kecil lagi, di Sumsel gas banyak, batu bara banyak. Kenapa tidak 500 MW atau 4x1000 MW. Wilayah Lahat itu batu baranya luar biasa, dari pada diekspor semua ngapain,” tandas politisi dari dapil Sumsel ini.

Menurutnya pembangkit kapasitas besar harga jual listriknya bisa ditekan lebih murah dan ini akan dapat membantu masyarakat. Ia memaparkan kunjungannya ke Cina meninjau keberhasilan negara tersebut membangun sumber daya listrik. Provinsi Guangzhou saat ini sudah memiliki kapasitas 47000 MW sedangkan Sumsel yang kaya energi baru 42000 MW. Bhutan

yang hanya berpenduduk 2 juta jiwa berhasil mencapai 32000 MW sebagian dijual ke negara tetangga India.

Menjawab hal ini Kepala Divisi Konstruksi PT. PLN Eko Sudartanto yang bicara didampingi jajaran pimpinan PLTGU Keramasan menjelaskan memang ada keinginan kontraktor asing mendatangkan seluruh peralatan dari luar. Namun peraturan perusahaan pelat merah ini cukup tegas, produk dalam negeri harus menjadi prioritas. “Misalnya kontraktor menyebut mendatangkan turbin satu set, kita minta itu dipecah sehingga perusahaan dalam negeri bisa kebagian kue,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan proyek di Keramasan ia meminta kontraktor asal Jepang menggunakan standar spesifikasi yang berlaku di dunia. Basic design pembangkit juga tidak bisa ditetapkan sendiri oleh perusahaan asal Jepang tersebut, tetapi harus lewat mekanisme persetujuan PT. PLN. Targetnya Unit I PLTGU diharapkan sudah dapat berproduksi pada akhir Desember 2013. Proyeksinya listrik yang dihasilkan dapat mendukung rencana pembangunan Pelabuhan Internasional di Bagan Siapi-api. (iky)foto:parle

# Menyongsong BPJS Kesehatan 2014 Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Obat

Menyongsong terwujudnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Bidang Kesehatan tahun 2014, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes) menjamin ketersediaan dan pemerataan obat generik yang bermutu.



Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz

**H**ak tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz saat menutup rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Dir-

jen Binfar dan Alkes dan jajarannya, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (5/3)

Guna terwujudnya BPJS Kesehatan

2014 tersebut, Ditjen Binfar dan Alkes diminta untuk melakukan upaya revitalisasi dan reposisi obat generik termasuk sosialisasinya kepada masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan obat yang rasional.

”Dalam upaya efisiensi industri, produktivitas dan pengendalian harga obat, Ditjen Binfar dan Alkes diminta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha di bidang obat termasuk melakukan pembinaan yang intensif terhadap industri farmasi dan menerbitkan regulasi terkait guna mencapai produktivitas industri farmasi,” papar Irgan.

Komisi IX DPR RI meminta Ditjen Binfar dan Alkes melakukan koordinasi lintas sektoral terkait pembiayaan dan regulasi untuk peningkatan kapasitas produksi.

Komisi IX DPR RI juga meminta Ditjen Binfar dan Alkes mengoptimalkan bahan baku berbasis lokal untuk meningkatkan kemandirian obat dan vaksin.

Rapat dengar pendapat Komisi IX yang membahas dukungan industri obat dan farmasi dalam pengadaan dan pemerataan obat generik dalam rangka menyongsong BPJS Kesehatan Tahun 2014 dihadiri pula oleh Direktur Utama PT. Kimia Farma (Persero), Direktur Utama PT. Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT. Indo Farma (Persero) dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia. (sc) foto: parle

# Pemerintah Harus Mencari Solusi Tanpa Kenaikan BBM

“Kita harus mencari solusi, oleh karena itu, konversi energi dan konservasi energi harus segera dilakukan,” kata Marzuki Alie.

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menemui pendemo BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, setelah menjadi pembicara dalam Dialog Nasional bertema “Pembangunan Peradaban Islam Menuju Indonesia Unggul dan Bermartabat”, di Gedung Training Center UIN Alauddin, Makassar, Senin (5/3).

Dia menyayangkan Indonesia masih besar dalam menggunakan energi yang tidak terbarukan berasal dari fosil seperti minyak bumi, sedangkan kita lupa untuk mengembangkan energi yang terbarukan. Potensi energi baru terbarukan sangat besar dimiliki Indonesia, Seharusnya sudah dipikirkan mengenai pengembangan energi terbarukan, sehingga perlu pengamanan energi pembangunan, karena kedepan kebutuhan energi semakin banyak.

Sebagai Negara yang maju suatu keniscayaan industri harus tumbuh, keperluan energinya semakin besar. Oleh karenanya Marzuki Alie dalam pertemuan Internasional meminta peranan Negara di dunia agar membantu Indonesia mengembangkan energi baru dan terbarukan, antara lain panas bumi yang dipergunakan hanya 3%. “Kalau kita mampu mengembangkan energi baru terbarukan, maka ketergantungan kita kepada energi fosil akan berkurang,” katanya.

Marzuki Alie juga mengungkapkan, Sebelumnya Pertamina atau kilang minyak dalam negeri hanya bisa mengolah minyak mentah menjadi BBM hanya spek atau klasifikasi tertentu saja. Tidak semua bisa diolah oleh kilang-kilang dalam negeri, termasuk minyak mentah yang impor. Jadi minyak mentah yang diimpor terbatas sehingga terjadi praktek mafia, apalagi pembelian terbatas hanya Petral. “Jika petral bermasalah makasebaiknya di bubarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengusulkan selain financial audit juga perlu dilakukan operasional audit. Karena audit oera-

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengakui kenaikan harga BBM berpengaruh kepada bertambahnya kemiskinan. Pemerintah harus mencari solusi sehingga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak perlu naik.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menemui pendemo BEM Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sional akan melihat efisiensi sejauh mana efisiensi yang dilakukan dengan keberadaan petral.

Pertamina juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengolahan minyak dalam negeri, hingga saat ini yang diolah oleh Pertamina hanya 50%, sedangkan 35% digunakan untuk membayar cost recovery, dan 15% untuk kontraktor.

Ketua DPR Marzuki Alie meminta agar 35% yang digunakan untuk cost recovery diambilalih oleh pemerintah, sehingga kita mengolah hasil produksi dalam negeri ini 85%, sehingga dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri untuk BBM bersubsidi. “Kita tidak akan terpengaruh dengan harga minyak dunia, karena kita mampu memproduksi 85%,” imbuhnya.

Hal itu dapat dilakukan dengan cara meminta persetujuan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan BP Miga. Persetujuan Menteri Keuangan untuk membayar 35% cost recovery dengan tunai tidak dengan minyak, Menteri

ESDM untuk kontrak perjanjiannya, BP Migas untuk memperhitungkan cost recovery secara efisien. Menurutnya perlu solusi, dengan berjuang agar 35% biaya cost recovery bisa ditarik olah dalam negeri, sehingga BBM subsidi tidak perlu naik.

Selain itu, Marzuki Mengungkapkan bahwa keperluan industri yang selama ini dengan kebijakan BBM impor, tapi bahayanya sering terjadi manipulasi oleh industri dengan sering mengambil BBM bersubsidi. Dengan naiknya harga minyak dunia, industri akan menghadapi harga minyak yang mahal, sehingga produksi minyak yang seharusnya untuk rakyat menjadi kurang karena diambil oleh industry.

Dia mengusulkan solusinya agar segera konferensi pemakaian minyak solar kepada industry ke gas. Kalau industry segera dikonferensi ke gas, maka industry dalam negeri akan bersaing, harga BBM tidak akan naik, apapun yang terjadi di luar negeri tidak akan berpengaruh di Indonesia. (as)foto:parle

# Pansus RUU Pemilu Kunjungi Prov. Bali

Dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung kesiapan penerapan sistem data kependudukan dan E-KTP. Pansus RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD melakukan kunjungan lapangan di dua kabupaten yang ada di provinsi Bali yaitu Kabupaten Denpasar Barat dan Kabupaten Badung (24/2).



Pansus RUU Pemilu saat melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Bali

Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika mengatakan, penerapan E-KTP merupakan salah satu aspek yang tidak bisa lepas dalam pelaksanaan Pemilu, oleh sebab itu kunjungan panitia khusus DPR RI ini menjadi hal yang sangat penting untuk meninjau kesiapan dari penerapan sistem ini. “Saya berharap Panitia Kerja DPR RI dapat merekam dan memperoleh kondisi riil yang terjadi di lapangan” ujarnya.

Made Mangku Pastika menambahkan sampai saat ini masih ditemukan masyarakat yang memiliki KTP ganda, jumlahnya ratusan. Pada kesempatan tersebut turut hadir Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Ir. Irman, dan Wakil Bupati Badung Ketut Sudikerta dan Sekretaris Kota

Denpasar Rai Iswara

Ketua Panitia khusus RUU Pemilu Arif Wibowo (F-PDI P) mengatakan UU Pemilu adalah UU yang strategis karena nantinya akan melahirkan pejabat negara, oleh karena itu tim ingin melihat bagaimana pelaksanaan E-KTP berjalan. “Memang masih ada kendala teknis di lapangan, namun sebagai alat di lapangan sesungguhnya E-KTP ini sangatlah efektif,” tegas Arif Wibowo.

Terkait dengan beberapa isu krusial dalam penyusunan RUU yang belum mendapatkan kesepakatan Arif Wibowo menjelaskan untuk persoalan ambang batas parlemen masih dinegosiasikan. “Minggu depan kami akan undang pimpinan fraksi dan pimpinan partai untuk mendiskusikannya de-

ngan pansus,” tambahnya.

Semua materi yang dibahas dalam RUU Pemilu Legislatif itu harus berakhir sebagai komitmen fraksi dan pemerintah pada pertengahan Maret dan akhir Maret 2012 bisa diparipurnakan sebagai UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang baru.

Ikut serta dalam kunjungan tersebut ketua Panitia RUU Pemilu Taufik Hidayat (F-PG) dan beberapa orang anggota pansus, seperti Gede Pasek Suardika, Ramadhan Pohan, dan Saan Mustopa (F-PD), Nurul Arifin (F-PG), Yasonna Laoly (F-PDIP), Al Muazzamil Yusuf (F-PPS), Totok Daryanto (F-PAN), Ahmad Yani, H. Muhammad Arwani Thomafi (F-PPP), Hj. Anna Mu’awannah (F-PKB) dan Akbar Faisal (F-Hanura). (ton/roy/TVP)foto:parle

# Paripurna DPR Setujui Perubahan UU Jabatan Notaris Menjadi Usul Inisiatif

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU usul inisiatif Baleg tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditetapkan menjadi Undang-undang inisiatif DPR dan diteruskan pembahasannya sesuai mekanisme persidangan DPR RI. Penetapan ini diambil pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa(6/3) yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Ali.

Dalam Pendapat Fraksi-fraksi yang disampaikan masing-masing juru bicara, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Pieter C. Zulkifli mengatakan, momentum saat ini sangat tepat untuk menyempurnakan UU tentang Jabatan Notaris.

Oleh karena, katanya, saat ini banyak terjadi persoalan hukum yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, seperti persoalan kepemilikan baik tanah, bangunan, maupun kepemilikan berkaitan dengan harta kekayaan, aset maupun kepemilikan perusahaan atau lainnya.

Menurut F-PD, RUU ini paling tidak harus dapat menjelaskan tentang hak, kewajiban, kewenangan dan ruang lingkup kerja dari jabatan notaris. Perdebatan tentang batas usia maksimal untuk jabatan Notaris (pensiun), mesti dilihat secara jernih mengingat bahwa secara kesehatan, masyarakat Indonesia sangat memiliki keterbatasan fisik secara rata-rata maksimal batas usia manusia Indonesia.

Terhadap kewenangan dan kewajiban Notaris, menjadi penting untuk secara jelas, tegas dan terperinci harus termaktub dalam RUU ini, sehingga dikemudian hari tidak menjadi perdebatan panjang dalam pranta hukum kita.

F-PD juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap jabatan Notaris oleh suatu lembaga independen dalam rangka mengontrol segala pekerjaan Notaris, serta penerapan sanksi tegas kepada Notaris yang memanipulasi data atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar



*Pieter C Zulkifli membacakan pendapat fraksinya di rapat paripurna*

H.M. Ade Surapriyatna menyampaikan beberapa catatan diantaranya, Notaris pada dasarnya dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang setelah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Fraksi Partai Golkar juga berpendapat bahwa sebaiknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik disengaja ataupun tidak disengaja harus dikenai sanksi karena hal itu meng-

akibatkan kerugian terhadap yang membutuhkan akta.

Sanksi tersebut, katanya, mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut dimaksudkan agar Notaris menjalankan profesinya dengan hati-hati dan menjunjung tinggi kode etik Notaris sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik.



Rahadi zakaria menyerahkan pendapat fraksinya kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie

Rahadi Zakaria juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, mengingat dalam perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa ketentuan yang dirubah, hendaknya perubahan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan wong cilik yang membutuhkan akses terhadap perlindungan dan kepastian hukum, termasuk perlunya pengaturan mengenai pelayanan hukum yang bersifat pro bono (gratis) oleh Notaris bagi masyarakat yang kurang mampu.

F-PDI Perjuangan juga mengangap perlunya pengkajian lebih mendalam terhadap penghapusan ketentuan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta-akta di bidang pertanahan, mengingat dalam praktiknya bidang kenotariatan erat dengan perbuatan hukum dalam bidang pertanahan.

F-PKS dengan juru bicara Abdul Hakim menyampaikan beberapa catatan diantaranya, rumusan Pasal 15 ayat 2 tentang tugas dan kewenangan Notaris terutama berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Le-

lang dalam membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah maupun risalah lelang harus dihapus, karena telah jelas disebutkan dalam UU Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan kelembagaan organisasi notaris, F-PKS mengusulkan agar organisasi tidak bersifat tunggal, sehingga diharapkan organisasi notaris akan lebih transparan dan dapat mengakomodir semua kepentingan untuk perkembangan dan kemajuan bersama.

Sementara juru bicara F-PAN, H. Jamaluddin Jafar mengatakan, fraksinya berpendapat RUU perubahan ini dapat berperan dalam mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para oknum notaris dalam pembuatan akta otentik. Selama ini, katanya, sering dijumpai oknum notaris yang melakukan pengurusan sertifikasi rumah menjadi mahal dan berbelit-belit.

Kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu harus dijalankan secara tegas dan konsisten dan sanksi tegas harus dijalankan secara konsisten.

Juru bicara Fraksi PPP H. Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, fraksinya menyetujui usia Notaris ditetapkan 67 tahun dengan tidak dilakukan perpanjangan masa jabatan. Penetapan usia pensiun ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan ruang yang lebih luas bagi regenerasi Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan penambahan waktu magang menjadi 24 bulan dan kewajiban bagi Notaris magang untuk menjaga kerahasiaan jabatan Notaris, diharapkan akan lebih meningkatkan kapasitas, integritas dan profesionalisme Notaris bagi calon-calon Notaris baru.

Fraksi PKB melalui juru bicara H. Otong Andurahman menyampaikan, fraksinya berharap revisi ini tidak hanya diperlukan untuk menjawab persoalan kekinian yang saat ini secara faktual kita hadapi.

Namun, katanya, juga harus diupayakan untuk mampu menjawab tantangan ke depan, mengingat bahwa hukum sesuai dengan doktrinnya merupakan alat perekayasa sosial (law as social engineering).

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Mestariy Habibie menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah logika mengurangi dan/atau mengampunasi kewenangan jabatan Notaris merupakan hal yang kontraproduktif karena hanya akan memperkecil akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum.

Dalam konteks ini, katanya, yang diperlukan dalam perubahan UU tentang Jabatan Notaris adalah mempertegas dan memantapkan kewenangan yang dimiliki Jabatan Notaris seperti terkait dengan pembuatan akta yang berkaitan dengan tanah maupun risalah lelang.

Fraksi Partai Hanura melalui juru bicara H. Muchtar Amma menyampaikan beberapa catatan salah satunya pengawasan atas pelaksanaan jabatan Notaris membutuhkan pendanaan yang cukup.

Oleh karena itu, dalam perubahan ini, pendanaan atas majelis pengawas ditegaskan lagi dan diberikan wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengaturnya. (tt) foto: parle

# DPR Tawarkan Investasi Energi Terbarukan Ke Negara G-20

DPR RI menawarkan investasi energi baru dan terbarukan ke seluruh negara anggota G-20 sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan di sektor energi.



Delegasi Negara Anggota G-20 saat menghadiri forum the 3<sup>rd</sup> G-20 Speaker's Consultation di Riyadh, Arab Saudi

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRRI Marzuki Alie saat berbicara dalam forum The 3<sup>rd</sup> G-20 Speaker's Consultation yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, 24-29 Februari 2012.

Forum G-20 Speaker's Consultation merupakan forum Ketua Parlemen negara-negara anggota G-20 untuk saling berdialog dan menyampaikan pandangannya terkait isu-isu global yang kini dihadapi oleh G-20. Selain Marzuki Alie sebagai Ketua Delegasi DPRRI, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid dan anggota BKSAP Azam Azman Nattawijana (FPD) dan Nazaruddin Kiemas (FPDIP) serta anggota DPR Agus Sulistiyono (FPKB) menjadi bagian dari anggota Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.

Forum tersebut membahas tiga topik yakni mengenai Global Dialogue of Culture, Energy for Sustainable Development dan Financial Crisis and its impact on Global Economy. Dalam Sesi Energy for Sustainable Development, Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengajak

partisipasi dan investasi langsung dari negara anggota G-20 dalam pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. "Kebutuhan energi dunia semakin meningkat, sementara pasokan energi fosil semakin menurun. Untuk itu perlu pengembangan energi terbarukan," urai Marzuki.

Di Indonesia, paparnya, konsumsi energi meningkat 7% per tahun, dengan penggunaan energi baru dan terbarukan masih berada di kisaran 4%. Padahal, potensi Indonesia di sektor energi baru dan terbarukan sangat besar. "Indonesia memiliki potensi sekitar 40% sumber daya panas bumi dunia, lebih dari 75.000 MegaWatt potensi sumber daya tenaga air, 50.000 MW potensi sumber daya biomass, serta potensi lainnya dari angin dan matahari," beber Marzuki.

Untuk itu, kebutuhan riset maupun eksplorasi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sangat dibutuhkan oleh dunia termasuk Indonesia. Target Indonesia kedepan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 25% pada 2025. "Kami

mengundang kontribusi dan investasi langsung dari negara anggota G-20 dalam pengembangan energi terbarukan. Saya yakin dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan Indonesia, kita dapat memastikan pengembangan bisnis energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan seiringan," katanya menawarkan.

Selain mengikuti forum tersebut, di sela-sela sidang, Delegasi DPR menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi parlemen negara anggota G-20 seperti Parlemen Turki, Parlemen Uni Eropa, serta Parlemen Arab Saudi. Khusus Parlemen Arab Saudi, DPR RI mengharapkan Parlemen Arab Saudi dapat mendukung upaya komprehensif yang dilakukan kedua negara untuk melindungi TKI yang bekerja di Arab Saudi. DPR RI juga mengharapkan adanya peningkatan kuota haji bagi jemaah Indonesia, agar masyarakat Indonesia tidak terlalu lama masuk dalam masa tunggu. "Masa tunggu untuk bisa haji saat ini sudah mencapai tujuh tahun," lanjut Marzuki. (red. pem-)/foto:BKSAP/Parle.

# Indonesia Memimpin Sidang Parliament Event Pada Sidang Ke 56 PBB Commission Of The Status Of Women, New York, 29 Februari 2012

Walaupun ditandai dengan perubahan politik yang cukup dramatis dan transformasi kearah demokrasi, namun belum ada kemajuan yang signifikan untuk partisipasi perempuan di politik dan sayangnya ada kecenderungan kurangnya global political will untuk merubah status quo ini.

Hal tersebut diatas merupakan temuan IPU dalam Annual Study on Women Parliamentarians yang diluncurkan pada saat Sidang tahunan parlemen joint event antara Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women dalam rangka sesi ke 56 Commission on the Status of Women di New York pada akhir Pebruari 2012. Sidang joint event IPU dengan PBB sendiri memfokuskan pada tema *empowering rural women: what role for parliaments?* Indonesia, dalam hal ini, Dr Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, yang juga President of Women Parliamentarians of IPU, memimpin seluruh sesi sidang yang dihadiri oleh 38 parlemen dan 10 organisasi internasional. Dalam pertemuan ini parlemen menegaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memajukan pemberdayaan perempuan di pedesaan, meminta komitmen pemerintah dan stake holder untuk penguatannya.

Sesi pertama parliamentary event ini dihadiri oleh Ms. Michelle Bachelet, UN Under-Secretary General and Executive Director of UN Women, dan Presiden IPU, Mr. Abdelwahad Radi. Sedangkan Chair of the Commission of the Status of Women, H.E. Ms. Marjon V. Kamara hadir pada pembukaan sesi kedua. Dr Nurhayati Ali Assegaf membuka sidang dengan menyatakan bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara pemberdayaan perempuan pedesaan dengan pencapaian Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium). Dalam kaitan ini, kerjasama UN dengan pemerintah, dan IPU dan parlemen Negara anggotanya menjadi sangat penting. Terdapat ur-

gensis kepentingan untuk meninjau kembali, mengubah dan menghapus perangkat hukum dan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. kapasitas anggota parlemen untuk melakukan legislasi, memonitor penegakan hukum, membentuk kebijakan publik, serta menyetujui anggaran, akan menentukan realisasi kesepakatan di tingkat global terkait perempuan pedesaan.

Sejumlah panelis memberikan pandangan mulai dari Ketua Parlemen Uganda, Mme Rebecca Kadaga, hingga Ketua-ketua badan di PBB. Delegasi Indonesia, Dra. Harbiah Salahuddin, MSI, Anggota BKSAP dari F PG, menyampaikan dalam forum, berbagai inisiatif Indonesia dalam akses layanan kesehatan untuk perempuan pedesaan dan pemberdayaan politik perempuan pedesaan. Indonesia menyampaikan sudah adanya Asuransi Melahirkan yang mencakup layanan kontrasepsi, counseling, serta layanan kesehatan bagi bayi baru lahir. Asuransi ini merupakan alternatif mengatasi keterbatasan ekonomi dan kesulitan lokasi. Mengenai pemberdayaan politik perempuan pedesaan, Indonesia menyatakan bahwa desentralisasi kekuasaan telah memberikan kesempatan bagi rakyat untuk ikut ambil bagian dalam penyusunan kebijakan dan memonitor kebijakan pemerintah, termasuk peningkatan peran perempuan pedesaan. Hal demikian memberikan kesempatan bagi perempuan pedesaan untuk terlibat secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan.

Lebih lanjut Dra. Harbiah Salahuddin, MSI menyampaikan bahwa tidak ada diskriminasi untuk perempuan

dalam perundangan di Indonesia, namun diakui pengawasan perlu ditingkatkan di tingkat implementasi.

Pertemuan tersebut menyepakati bahwa peningkatan partisipasi perempuan saja tidak cukup, guna memastikan kepentingan perempuan pedesaan diakomodasi perlu upaya-upaya peningkatan representasi perempuan di semua tingkat. penguatan keterlibatan perempuan di politik disebutkan seperti melalui peraturan hukum, seperti reserved seat (jatah kursi) maupun candidate quotas (kuota dalam list calon); capacity building; gender sensitive action; sampai ke mendorong partai politik untuk membuat aturan mengenai mengalokasikan pendanaan untuk caleg perempuan, pemilihan kandidat (recruitment), dan kuota di partai.

Selain memimpin Sidang Parliamentary Event, Dr. Nurhayati Ali Assegaf melakukan pertemuan dengan Rabbi Michael Weisser dalam rangka mencari dukungan untuk pembebasan Ketua Parlemen (Palestinian Legislative Council) Palestina, Mr. AbdelAziz Dweik, yang ditahan di military checkpoint dekat Ramallah, the West Bank. Selain itu diadakan juga beberapa pertemuan bilateral antara lain dengan USG/Executive Director UN-Women, Ms. Michelle Bachelet, mengenai perkembangan upaya parlemen dalam pemberdayaan perempuan; dengan Chief UN Commission to Combat Desertification (UNCCD) Mr. Melchiade Bukuru (mengingat Indonesia adalah salah satu focal point UNCCD) untuk membahas peran yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam upaya mengatasi degradasi tanah dan penggurunan. (parle) foto:parle

# Parlemen Denmark Apresiasi Kemajuan Demokrasi di Indonesia

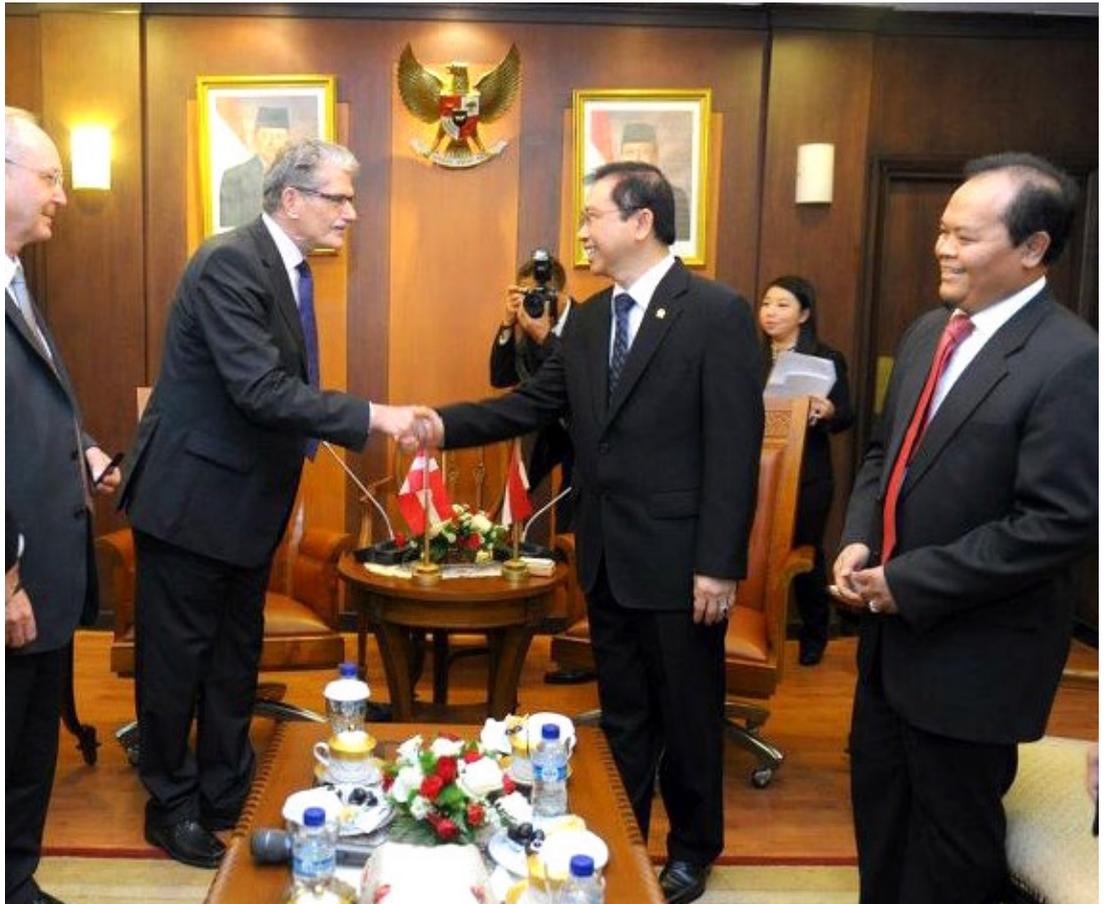
Ketua parlemen Denmark Mogens Lykketoft mengapresiasi perkembangan dan kemajuan demokrasi Indonesia bahkan Parlemen Denmark menganggap Indonesia telah memiliki peranan penting dalam struktur keamanan di Asia.

“Kami terkesan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, karena itu kita mengajak Indonesia untuk mencari solusi dan permasalahan global seperti perubahan iklim dan pelucutan senjata,”katanya saat menemui Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, Mogens mengharapkan hubungan kedua negara semakin meningkat dalam berbagai bidang. Saat kunjungan tersebut, parlemen Denmark dan Indonesia saling bertukar informasi terkait perkembangan demokrasi khususnya di Indonesia. “Kita ingin mengetahui cara kerja demokrasi di Indonesia,”papar Mogens.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Indonesia telah mereformasi sistem politiknya dari sistem otoritarian menjadi demokrasi pada era reformasi tahun 1998-1999 lalu. “Denmark merupakan negara yang telah berpengalaman dengan sistem demokrasi karena itu kita harapkan dapat saling belajar,”katanya. Denmark, lanjutnya, menganut sistem welfare state dan prinsipnya hampir sama dengan Indonesia yang bertujuan mensejahterakan rakyat.

Menurut Marzuki, Indonesia juga telah melakukan perubahan konstitusi sebanyak 4 kali dan Kita dahulu memi-



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima Ketua Parlemen Denmark Mogens Lykketoft di Gedung DPR RI

liki tiga Parpol dimana hasil pemilu sudah dapat diprediksi. “Presiden dipilih oleh MPR dan telah ditetapkan siapa Presidennya,”terangnya menjelaskan sistem politik Orba.

Akhirnya dengan perubahan konstitusi, Indonesia menganut sistem multi partai dengan jumlah Parpol saat itu sebanyak 48 Parpol, kemudian 24 Parpol. terakhir 36 nasional dan 6 partai lokal khusus daerah aceh.

“Kita memiliki ambang batas sebesar 2.5 persen untuk Parpol yang berhak duduk di DPR, akhirnya dari 36 Parpol hanya terdapat delapan yang lolos dan berhak duduk di DPR RI. sementara ra sesuai dengan ketentuan minimum

20 persen atau gabungan parpol dapat mengajukan calon presiden. Pada pemilu sebelumnya 5 persen kenapa ditingkatkan agar Presiden dapat didukung parpol yang kuat,”paparnya.

Terkait KKN di Indonesia, lanjut Marzuki, dirinya mengakui korupsi saat ini berada di semua sektor namun itu tidak mewakili lembaga keseluruhan. karena itu untuk membangun sistem demokrasi yang berkualitas perlu didorong peningkatan pendidikan masyarakat atau pemberantasan kemiskinan sehingga apabila masyarakat makmur diharapkan tidak dapat dipengaruhi oleh politik uang. (si) foto: parle

# Komisi I DPR Setujui Ratifikasi ACCT

Komisi I DPR RI telah setuju untuk meratifikasi Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme/ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT).



Anggota Komisi I DPR AI Muzammil Yusuf

Konvensi ini memberikan payung hukum bagi kerjasama anggota ASEAN dalam memberantas teroris di kawasan Asia Tenggara. Demikian di sampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, AI Muzammil Yusuf di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta (8/3).

“Semua fraksi di DPR sudah setuju, termasuk kami Fraksi PKS, agar konvensi ini diratifikasi menjadi undang-undang. Konvensi ini penting agar keamanan kawasan tetap terjaga dengan baik.” Paparnya.

Menurut Muzammil, Komisi I DPR RI sepakat untuk meratifikasi karena konvensi ini memberikan jaminan masing-masing anggota ASEAN untuk menjunjung prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, yurisdiksi, dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain.

“Yang lebih penting konvensi ini menegaskan bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama tertentu

dan memperkenalkan program rehabilitasi, agar pelaku tindak terorisme dapat kembali menjadi bagian masyarakat”. Tegas politisi PKS ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan keuntungan meratifikasi konvensi ini diantaranya setiap negara dapat saling tukar informasi intelijen terkait terorisme, saling memberikan bantuan hukum timbal balik, melaksanakan kewajiban ekstradisi, dan adanya kerjasama antar lembaga-lembaga penegak hukum.

“Sayangnya belum semua negara anggota ASEAN meratifikasi konvensi ini. Diantaranya Malaysia, Mianmar, Laos dan kita baru sekarang meratifikasi. Tugas Kemenlu ke depan adalah melakukan upaya diplomasi agar semua anggota ASEAN meratifikasinya.” Ujar Ketua Poksi I Fraksi PKS ini.

Namun, kata Muzammil, Fraksi PKS memberikan catatan kepada Pemerintah agar berkomitmen untuk tetap

menggunakan pendekatan penegakan hukum ( Law enforcement-focused approach) dalam menangani pemberantasan terorisme di Indonesia. “Bukan pendekatan intelijen seperti di Malaysia maupun pendekatan militer seperti di Filipina.” Katanya,

Pendekatan penegakkan hukum ini, kata anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung ini, lebih menjamin kesamaan kedudukan di depan hukum dan menjunjung hak asasi manusia di bandingkan pendekatan lainnya. Untuk itu Indonesia dapat menawarkan agar anggota negara ASEAN lainnya menggunakan pendekatan yang sama dalam menangani terorisme.

“Meski dalam prakteknya harus kita akui perlu banyak perbaikan tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan agar tidak sewenang-wenang dalam menindak tersangka teroris. Praduga tidak bersalah harus dikedepankan.” Tutup Muzammil. (si)foto:parle

# Pemerintah Bisa Tambah Cadangan Minyak Bumi, Tak Perlu Naikkan BBM

Anggota Komisi VII DPR Mardani Ali Sera mendesak Pemerintah meningkatkan produksi minyak bumi sehingga dapat menekan kenaikan harga BBM kedepannya.

“Pemerintah tidak bisa hanya mengeluh dan menyatakan telah ‘menyerah’ dalam upaya meningkatkan produksi minyak bumi,” jelas Mardani menanggapi pernyataan Kepala Divisi Humas BP-Migas Gde Pradnyana terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pemerintah harus semangat mengejar kekalahan dari Malaysia, Vietnam dan India dalam meningkatkan cadangan proven minyak bumi, dan tidak hanya terus-terusan mengeluh.

“Dalam data yang dimiliki Mardani, Malaysia mampu meningkatkan cadangan provennya dari 2,0 Milyard barel di tahun 1980 menjadi 5,0 Milyard barel th 2010, Vietnam dari 0,0 Milyard barel di tahun 1980 menjadi 4,4 Milyard tahun 2012 dan India dari 2,4 Milyard di tahun 1980 menjadi 8,5 Milyard tahun 2010,” ungkapnya.

Menurut Mardani seharusnya Indonesia mampu melakukan pengelolaan energi yang lebih baik, mengingat kita telah memiliki pengalaman lebih dini dari Malaysia, Vietnam dan India dalam mengelola sumberdaya minyak

bumi. Karena itu, Mardani yakin Indonesia mampu meningkatkan jumlah cadangan minyak bumi dari 3,7 Milyard menjadi 10 Milyard Barel.

“Teknologi eksplorasi melalui seismic 2 dimensi dan 3 dimensi serta teknologi enhance oil recovery (eor) atau teknologi lainnya pastilah sudah dikuasai oleh anak bangsa ini untuk digunakan mengeksplorasi 128 cekungan yang kita miliki dan demikian juga teknologi-teknologi untuk meng-eksplorasinya. Tinggal dibangun sinergitas antara anak bangsa yang tersebar diberbagai instansi Pemerintah dan di berbagai Perusahaan-perusahaan”, jelas Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan ini.

“Kita yakin ke depan, jika cadangan proven dan produksi Minyak bumi ini meningkat hingga minimal memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, maka bangsa ini akan terbebas dari gonjang-ganjing kenaikan BBM dan rakyat



Anggota Komisi VII DPR Mardani ali Sera

dapat menikmati energi yang murah,” yakin Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII ini. (SI) foto:parle

## Komisi X DPR RI Serap Masukan Terkait RUU Dikti

Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa, pendidikan tinggi diperlukan dalam menghadapi globalisasi di segala bidang.

“Komisi X DPR RI memandang perlu disusunnya Rancangan Undang-

undang tentang Pendidikan Tinggi sebagai sebuah sub-sistem yang terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional,” kata Mahyuddin Ketua Komisi X DPR RI saat Kunjungan Lapangan dalam rangka mencari masukan bagi

RUU Pendidikan Tinggi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, beberapa hari lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri wakil dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Banjarmasin, Mahyuddin

menjelaskan bahwa dalam penyusunan dan perumusan draft RUU tentang Pendidikan Tinggi telah dilakukan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis.

Mahyudin menyatakan pengaturan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

“Pengaturan Pendidikan Tinggi diharapkan menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa,” ujar Mahyudin.

Selain itu, pengaturan pendidikan

tinggi diharapkan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemandirian dan kemajuan bangsa, serta terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Turut serta dalam Kunjungan Lapangan Komisi X DPR RI ke Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin antara lain Sholeh Soe’aidy dan Ibrahim Saky Batubara masing-masing dari Fraksi Demokrat, Rully Chairul Azwar (F-PG), Puti Guntur Soekarno (F-PDIP), dan Jamal Mirdad (F-Hanura). (sc) foto:parle

\*\*\*



Ketua Komisi X DPR Mahyuddin

## Komisi I Dorong Penyelesaian Tunggakan BHP TVRI dan RRI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong penyelesaian tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio untuk LPP TVRI dan LPP RRI. Komisi I DPR RI akan segera melakukan pembahasan terkait bersama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan.



Menkominfo, Tifatul Sembiring

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Mahfud Siddiq, dengan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (12/3). Radio Republik Indonesia (RRI) hingga kini masih

menunggak pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi sebesar Rp195 juta. Tunggakan tersebut jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menunggak sekitar Rp34 miliar.

Hadir Pula dalam rapat tersebut Direktur Teknik TVRI Satya Sudhana dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Rosarita Niken Widiastuti

Rosarita Niken Widiastuti, mengatakan LPP RRI akan segera membayar tunggakan tersebut pada tahun ini. “Sebetulnya itu harus dibayarkan tahun lalu, tapi anggaran tahun lalu tidak mencukupi, sehingga pembayaran dibebankan tahun ini,” kata Niken

Menurut Niken, tunggakan tersebut selain karena masalah keterbatasan anggaran, juga karena ada penambahan beberapa frekuensi.

Pada tahun 2011, RRI memiliki beban BHP yang harus dibayar sebesar Rp1,8 miliar, tapi yang sudah dibayar sekitar Rp1,6 miliar. Tahun ini mereka wajib membayar sisa tunggakan tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tahun ini sudah dialokasikan, mudah-mudahan tidak punya utang lagi,” ujar Niken. (as) foto: parle

# Pansus Segera Tentukan Nasib RUU Kamnas

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional - Pansus RUU Kamnas DPR RI yang baru saja dibentuk siap menuntaskan tantangan pertama tugas mereka yaitu menentukan sikap apakah mengembalikan draft yang telah dikirimkan pemerintah atau langsung mem bahas nya dalam rapat.

“ Kalau kita mengacu pada pandangan Komisi I, draft RUU Kamnas dikembalikan kepada pemerintah karena sangat jauh dari sempurna. Ini salah satu opsi yang segera kita bicarakan dalam Pansus Kamnas. Opsi yang lain kita bahas dan kita sempurnakan bersama dalam rapat dengan pemerintah di pansus,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita Ketua Pansus RUU Kamnas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/12).

RUU Kamnas baginya sangat penting dalam rangka menata sistem keamanan nasional secara utuh. Ia menekankan pembahasannya akan dilakukan dengan sangat hati-hati karena menyangkut banyak sektor, terkait sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politisi Partai Golkar ini meyakini pansus akan mengawal pasal demi pasal untuk menjawab keraguan publik tentang kemungkinan rancangan undang-undang ini akan menabrak nilai-nilai demokrasi yang sudah tumbuh dan berkembang di tanah air.

“Pelestarian nilai-nilai demokrasi bukan hanya domain dari LSM, tapi itu pasti juga menjadi domain kita anggota DPR. Message kita clear kita harus menciptakan satu sistem keamanan nasional yang bisa bekerja dengan baik, menjawab tantangan kedepan dibidang demokrasi, HAM dan penegakan hukum,” tandasnya.

Pada bagian lain ia menampik informasi yang berkembang terjadi tarik menarik pembahasan RUU Kamnas antara Komisi I dan Komisi III. Semua kepentingan menurutnya sudah melebur dalam pansus yang beranggotakan lintas komisi dan fraksi.

Agus Gumiwang Kartasasmita terpilih menjadi Ketua Pansus dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Ia didampingi tiga wakil ketua yaitu Benny



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) saat memimpin rapat Pansus RUU Kamnas



Suasana rapat Pansus RUU Kamnas

K. Harman (FPD), Tri Medya Panjaitan (FPDIP) dan Hidayat Nurwahid (FPKS). Pemilihan pimpinan pansus ini berlangsung dengan mekanisme pemungutan suara.

“Jadi di DPR ini ada 11 Pansus, 2 diantaranya Pansus Century dan

Pansus Kamnas penetapan pimpinan lewat mekanisme voting. Saya sebenarnya prihatin tidak bisa dengan musyawarah mufakat, tapi voting ini juga peristiwa demokrasi yang harus dihormati,” demikian Priyo. (iky) foto: ry/parle

# DPR RI Tetapkan Pimpinan Pansus RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Desa

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Totok Daryanto (F-PAN) sebagai Ketua Pansus RUU Pemerintahan Daerah dan Akhmad Muqowam (F-PPP) sebagai Ketua Pansus RUU Desa.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) saat memimpin Pansus RUU Pemerintah Daerah dan RUU Desa

jatmiko (F-PDIP) sebagai Wakil ketua kedua Pansus tersebut, di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (8/3).

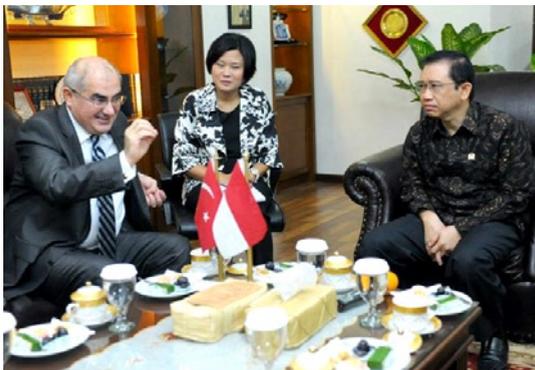
Anggota Pansus kedua RUU tersebut adalah Darizal Basir, Abdul Gaffar Patappe, Abdul Wahab Dalimunthe, Ramadhan Pohan, Nanang Samodra, Subyakto, Eddy Sadeli (F-PD), Nurul Arifin, Taufiq Hidayat, Hardisoesilo, Ali Wongso Halomoan sinaga, Bambang Sutrisno (F-PG), Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Nursuhud, Theodorus Jacob Keokerits (F-PDIP), Hermanto, Yan Herizal, Abdul Azis Suseno (F-PKS), Rusli Ridwan (F-PAN), AW Thalib (F-PPP), Baharuddin Nasori, Abdul Malik Haramain (F-PKB), Mestariyani Habie (F-PGerindra), dan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (F-PHanura). (as) Foto : HY/Parle

**P**enetapan pimpinan Pansus RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Desa, yang dipimpin Wakil Ketua

DPR RI Priyo Budi Santoso, juga menetapkan Khatibul Umum Wiranu (F-PD), Ibnu Munzir (F-PG) dan Budiman Sud-

# Dubes Turki Pamitan ke Ketua DPR

Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang ditemani Ketua BKSAP, Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua BKSAP, Andi Anzhar Cakra Wijaya dan Muhammad Najib menerima kunjungan dari Dubes Turki untuk Indonesia, Murat Adali, di Ruang Tamu Pimpinan, Rabu (7/3).



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menemui Dubes Turki Murat Adali

**D**alam kunjungannya kali ini Murat Adali berpamitan kepada masyarakat Indonesia melalui Pimpinan DPR dan menyatakan rasa

terima kasihnya karena telah diterima dengan baik di Indonesia. "Saya sangat berterimakasih karena selama ini telah mendapatkan dukungan untuk menjalankan tugas sebagai Dubes Turki untuk Indonesia," jelasnya.

Murat mengatakan, hubungan yang telah terjalin diantara kedua negarasudah sangat baik dan diantara kedua negara saling memberikan dukungan yang positif untuk kemajuan kedua belah pihak. "Tidak hanya itu saja dengan adanya beragam kegiatan untuk saling

mengunjungi, tentunya akan membuat hubungan semakin erat," katanya.

Senada dengan hal tersebut, Hidayat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Murat karena telah menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Indonesia selama ini. Ia menuturkan, dengan dibuatnya perwakilan konsulat Indonesia di Istanbul, akan semakin mempererat hubungan yang ada antar kedua negara. "Dengan dibangunnya Konsulat Indonesia di Istanbul pun membuktikan kesuksesan Duta Besar Turki untuk Indonesia karena sudah dapat mempermudah pembangunan kantor perwakilan Indonesia di Istanbul," terangnya. (ra) foto: parle

# Ketua DPR Terima Dubes Bosnia Herzegovina

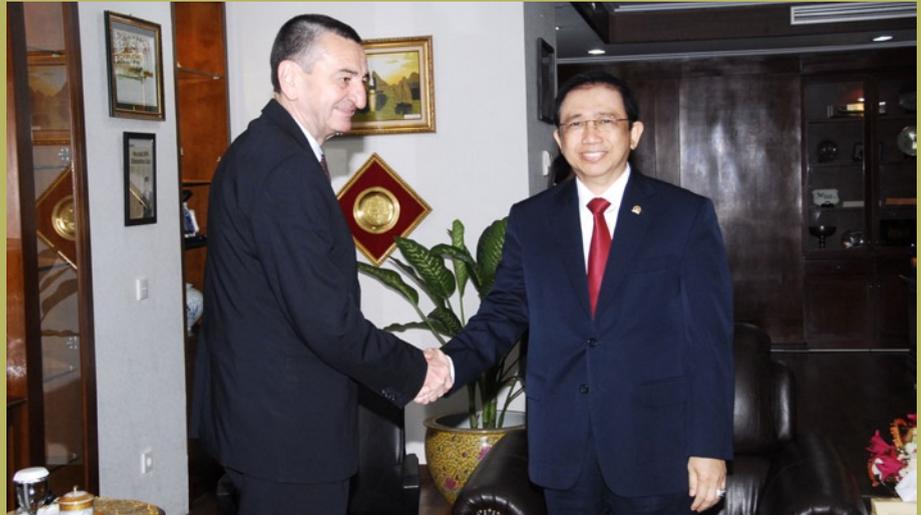
Ketua DPR Marzuki Alie dengan didampingi Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid, telah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bosnia Herzegovina Mr. Fuad Sabeta, pertemuan ini dilakukan di ruang kerja Ketua DPR lantai 3 Gedung Nusantara 3 DPR Senayan Jakarta, Senin, (12/3) siang.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, bahwa hubungan antara Indonesia dengan Bosnia sudah diawali dengan pembukaan hubungan diplomatik, setelah Bosnia berpisah dengan negara Yugoslavia. Indonesia hingga saat ini masih tetap menjadi sahabat Bosnia dan tetap memandang Bosnia sebagai negara yang potensial untuk bersama-sama membangun hubungan bilateral yang lebih maju dan bermanfaat bagi kedua negara, kata Marzuki.

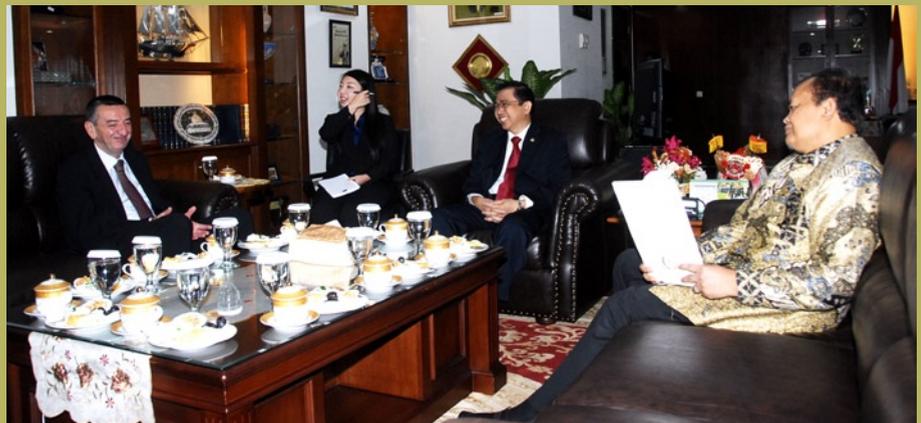
Marzuki Alie juga menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia melanjutkan upaya proses demokrasi, membangun sistem pemerintahan yang bersih dan kuat, melakukan penghormatan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), serta membangun masyarakat madani. Semoga dengan perkembangan tersebut Indonesia menjadi lebih kondusif dan stabil memperkuat hubungan bilateral kedua negara, ujar Ketua DPR Marzuki Alie.

Dikatakan juga bahwa mengenai isu-isu utama internasional yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama, Indonesia dan Bosnia tetap bekerjasama sebagai sesama negara berkembang dan mengharapkan dukungan dari berbagai kelompok negara dan organisasi internasional lainnya untuk mengatasi masalah bersama tersebut, baik melalui forum bilateral maupun forum multilateral, tegas Marzuki.

Berkaitan dengan kerjasama parlemen kedua negara ini, Marzuki melihat perlunya dibangun kerjasama antar parlemen kedua negara yang lebih intensif guna menjembatani berbagai kepentingan Indonesia dengan Bosnia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun program kerjasama



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bosnia Herzegovina Mr. Fuad Sabeta di Gedung DPR



antar parlemen dan kegiatan saling kunjung antar kedua parlemen.

Ketua DPR Marzuki Alie juga mengatakan bahwa forum seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) juga dapat dijadikan sarana oleh Parlemen Bosnia dalam memberikan kontribusi dan peranannya untuk bersama-sama mengatasi berbagai masalah yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama.

Dengan kunjungan Dubes Bosnia ini, DPR berharap dapat lebih mening-

katkan saling pengertian dan dapat memperkuat hubungan kedua negara, dan juga diharapkan hubungan bilateral yang telah dirintis oleh pendahulu pemimpin Bosnia.

Dikatakan juga bahwa Bosnia mempunyai industri pertahanan yang cukup bagus, dengan melalui ini keinginannya bisa ditindaklanjuti bersama untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Bosnia dengan Indonesia. (Spy) foto:parle



Ketua parlemen Denmark Mogens Lykketoft bersama delegasinya menemui Ketua DPR Marzuki Alie di gedung Nusantara III, 8 Maret 2012. foto:IW



DPR RI menghadiri Sidang tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) di New York, dan memimpin sidang Parliamentary Event pada sidang ke-56 PBB Commission of the status of women. 29 Februari 2012. foto:parle



Kunjungan Panja RUU Dikti ke Makassar dalam rangka mendapat masukan dari civitas akademika Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas 45 Makassar dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dipimpin oleh Syamsul Bachri. 9 Maret 2012 foto:nt

